

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Perkotaan Berbasis Masyarakat: Studi Pada Bank Sampah Unit Unyur Makmur Di Kecamatan Serang

Melvy Regitta Azahra¹, Riswanda²

¹⁻²Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

¹gitta848@gmail.com, ²riswanda@untirta.ac.id

Corresponding author: gitta848@gmail.com

Submitted: 14/12/2025; Revised: 20/12/2025; Published: 23/12/2025

DOI: <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i2.425>

Abstract

The issue of waste management, which continues to pose serious environmental challenges, remains a national concern in many regions, including the City of Serang. This study aims to analyze the implementation of community-based urban waste management policies through waste banks, referring to Serang City Regional Regulation Number 7 of 2021 on Waste Management. The research is driven by the persistence of illegal dumping sites, limited facilities and infrastructure for waste handling, and low public awareness that has not been adequately supported by socialization efforts or collaboration between private actors and relevant government agencies in Serang City. This study employs a descriptive qualitative method with a case study approach and draws on Charles O. Jones's policy implementation theory. Data were collected through non-participant observation, semi-structured interviews, and documentation. The analysis followed the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana, consisting of data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of community-based waste management through waste banks has not yet operated effectively. Key contributing factors include limited human resources, insufficient budget allocation, and weak outreach efforts. The Environmental Agency (DLH) serves as the primary implementing body for waste management; however, stronger support from private institutions and community groups is needed to foster behavioral change and strengthen waste-management institutions at the local level.

Keywords: Policy Implementation, Community-Based Waste Management, Waste Banks.

Abstrak

Permasalahan pengelolaan sampah yang berdampak serius bagi lingkungan masih menjadi isu nasional diberbagai daerah termasuk Kota Serang. Penelitian ini bertujuan menganalisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Perkotaan Berbasis Masyarakat melalui bank sampah mengacu pada Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyak terdapat titik pembuangan sampah ilegal, sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah serta rendahnya kesadaran masyarakat yang belum didukung oleh sosialisasi dan kolaborasi yang memadai dari lembaga swasta dan

instansi terkait di Kota Serang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus serta teori implementasi kebijakan yang digunakan menurut Charles O. Jones kemudian pengumpulan data dilakukan melalui observasi nonpartisipan, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis menggunakan model interaktif menurut Miles, Huberman dan Saldana diantaranya yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui bank sampah belum berjalan secara optimal disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan jangkauan sosialisasi. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup menjadi lembaga pelaksana utama dalam pengelolaan sampah, namun perlu didukung oleh lembaga swasta dan komunitas dalam mendorong perubahan perilaku dan penguatan kelembagaan pengelolaan sampah pada tingkat lokal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, dan Bank Sampah.

Pendahuluan

Pertumbuhan penduduk Indonesia terus meningkat setiap tahun sehingga menyebabkan meningkatnya konsumsi masyarakat yang berdampak pada bertambahnya jumlah limbah domestik yang dihasilkan, sehingga volume sampah meningkat dari waktu ke waktu. Meningkatnya volume sampah tersebut memicu persoalan sampah yang kompleks seperti keterbatasan layanan dalam pengelolaan sampah, lemahnya penegakan regulasi terhadap pelanggaran, serta masih banyaknya pola perilaku masyarakat yang tidak mendukung pengelolaan sampah dengan baik. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa persoalan sampah masih menjadi persoalan strategis di Indonesia yang memerlukan upaya penanganan yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan sampah antara lain pertumbuhan populasi, perkembangan ekonomi, dan tingkat urbanisasi yang tinggi (Fadilla & Kriswibowo, 2022).

Sebagian besar masyarakat di Indonesia memiliki pola kebiasaan membuang sampah dengan metode Kumpul-Angkut-Buang hal tersebut dilakukan terus menerus dan di tiru bagi masyarakat yang melihatnya sehingga menyebabkan timbulnya tempat sampah ilegal. Selain itu meskipun peraturan lingkungan telah berlaku termasuk penyediaan tempat sampah berwarna merah untuk sampah bahan berbahaya dan beracun (B3), kuning untuk sampah anorganik dan hijau untuk sampah organik namun

pelaksanaannya masih terhambat oleh kebiasaan masyarakat yang belum terbentuk dalam memilah sampah. (Sorotan Riswanda, 2022)

Tabel 1
Jumlah Sampah Yang Ditangani dan Jumlah Produksi Sampah Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Sampah Yang Ditangani	Jumlah Volume Produksi Sampah	Persentase %
1.	Cipocok Jaya	5.629,32	15.652,94	35,96
2.	Curug	2.695,73	9.361,05	28,80
3.	Kasemen	6.683,35	16.789,17	39,81
4.	Serang	23.123,57	35.532,72	65,08
5.	Taktakan	4.071,58	15.968,47	25,50
6.	Walantaka	4.435,36	16.085,03	27,57

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, 2024.

Data menunjukkan bahwa Kecamatan Serang merupakan daerah dengan produksi sampah tertinggi di Kota Serang, terlihat bahwa masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan dalam pengelolaan sampah artinya pengelolaan sampah di Kota Serang masih belum merata antar wilayah. Dalam data tersebut terdapat daerah dengan jumlah sampah yang ditangani dengan presentase rendah seperti mengalami keterbatasan fasilitas, armada maupun dukungan dari berbagai lembaga. Secara keseluruhan data tersebut menegaskan perlu adanya penguatan dan dorongan dari program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Jika ditinjau dengan kerangka regulasi kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan regulatif dengan implementasinya di lapangan. Pada Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menekankan kewajiban pemerintah daerah agar menjamin terselenggaran pengelolaan sampah termasuk penyedia sarana dan prasarana serta peningkatan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, guna menekan volume sampah yang terus meningkat. Pemerintah Daerah Kota Serang mengoptimalkan penerapan program bank sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah, adapun ketentuan mengenai pengelolaan sampah melalui bank sampah tercantum dalam pasal 37 yang menegaskan bahwa dalam upaya menerapkan kegiatan

3R, masyarakat atau lembaga pengelola sampah didorong untuk membentuk dan mengembangkan bank sampah.

Diketahui bahwa terdapat 46 bank sampah yang di berbagai kecamatan di Kota Serang. Dengan jumlah masing masing pada tiap kecamatan yaitu 21 Bank Sampah di Kecamatan Serang, 8 bank sampah di Kecamatan Taktakan, 6 bank sampah di kecamatan walantaka, 4 Bank sampah di kecamatan kasemen dan 2 bank sampah di kecamatan curug dan 3 bank sampah di kecamatan cipocok jaya.

Namun, pada kenyataannya di lapangan masih terdapat beberapa kendala yang ditemui oleh peneliti antara lain seperti : 1) Masih terdapat tempat pembuangan sampah (TPS) liar yang disebabkan oleh minimnya penyediaan tempat pembuangan sampah (TPS) resmi serta armada untuk pengangkutan sampah di Kota Serang. 2) Dalam pelaksanaannya bank sampah unit unyur makmur masih terkendala terkait sarana dan prasarana. 3) Belum maksimalnya sosialisasi dan dukungan yang dilakukan sehingga masih terdapat kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pentingnya pengelolaan sampah melalui bank sampah.

Perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu oleh Hastusti et al. (2021) menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan menitikberatkan pada faktor-faktor teknis layanan dan administratif pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudin dan Susetyo (2024) mengkaji program bank sampah di Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Namun, lebih mengutamakan pada operasional program tanpa menguraikan secara komprehensif keterkaitan antara kerangka kebijakan, peran lembaga pemerintah serta tingkat keterlibatan masyarakat. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada aspek integrasi kebijakan, partisipasi masyarakat, serta peran lembaga pemerintah sebagai fokus utama analisis melalui Studi Pada Bank Sampah Unit Unyur Makmur di Kecamatan Serang.

Berdasarkan permasalahan di atas, terdapat rumusan masalah tersebut Bagaimana implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Perkotaan Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah Unit Unyur Makmur di Kota Serang serta upaya apa yang telah dilakukan

dalam mengatasi permasalahan di lapangan? Maka demikian, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan tersebut dan mengidentifikasi upaya penanganan yang menghambat berjalannya sebuah kebijakan. Penelitian ini mengelaborasi bagaimana partisipasi lembaga pemerintah, edukasi lingkungan serta parameter capaian atau tolak ukur evaluasi di tingkat komunitas masyarakat saling berkaitan, sehingga dapat menjadi acuan untuk memperbaiki kerangka kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Serang.

Tinjauan Pustaka

Kebijakan Publik

Kebijakan Publik menurut Jay M. Shafritz et al. (2017:47) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah “*what government decides to do or not to do*” dapat dimaknai bahwa pemerintah dapat membuat pilihan baik tindakan nyata maupun keputusan untuk tidak melakukan apapun. Kemudian, H. Hugh Heglo dalam (Abidin, 2017:6) mengatakan kebijakan sebagai “*a course of action intended to accomplish some end*” dapat dipahami bahwa sebuah kebijakan perlu dirancang dengan tindakan yang jelas agar mencapai hasil yang diinginkan. Thomas R. Dye (2011, dalam Nugroho, 2017) menjelaskan bahwa setiap kebijakan selalu memerlukan alokasi biaya dan pada saat yang sama akan memengaruhi bagaimana biaya dan manfaat tersebut diterima oleh pihak-pihak yang terlibat. Kebijakan juga menjadi cara pemerintah untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dari berbagai definisi tentang kebijakan publik, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh aktor baik individu maupun kelompok untuk menetapkan aturan dan langkah-langkah tertentu di berbagai tingkat pemerintahan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik dalam Subianto (2020) mengatakan bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan

dalam mencapai tujuan. Faktor – faktor tersebut terbagi menjadi dua pendekatan yaitu, pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan *top-down* dilakukan dengan pengambilan keputusan dari aktor yang paling atas kemudian pelaksanaannya dilakukan oleh birokrasi pada tingkat bawah. Sedangkan pendekatan *bottom-up* dimulai dari birokrat tingkat bawah dengan melibatkan pembuat Keputusan tertinggi pada sektor publik maupun privat. Penelitian ini menggunakan teori Charles O. Jones (Agustino, 2020:169) menjelaskan bahwa dalam mengimplementasi suatu kebijakan terdapat aspek yang perlu diperhatikan diantaranya :

1. Organisasi, mencakup aspek yang memfokuskan pada penataan kembali sumber daya manusia, ketersediaan sumber daya anggaran serta sarana dan prasarana dalam sebuah implementasi kebijakan.
2. Interpretasi, aspek ini terdiri dari respon terhadap kebijakan baik dari perspektif pemerintah, bank sampah maupun aktor lainnya. Selain itu, terdiri sub aspek komunikasi yang memiliki tujuan mengetahui pola komunikasi antar aktor.
3. Penerapan, aspek ini mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, serta mengetahui monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan oleh antar aktor kebijakan.

Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai peran utama dalam mengelola sampah. Pemerintah dan instansi terkait memiliki peran sebagai fasilitator dan pemberi dorongan dalam pengelolaan lingkungan, seperti diperlukannya fasilitas yang memadai serta pelaksanaan program yang melibatkan masyarakat sebagai strategi untuk memberdayakan mereka dengan memperluas dan meningkatkan jangkauan terhadap sumber daya lingkungan hidup (Purwendah et al., 2022). Pengelolaan sampah dengan pendekatan 3R (*reduce, reuse, recycle*) menjadi salah satu alternatif karena dapat menekan pertumbuhan volume sampah sekaligus meningkatkan nilai ekonomis melalui kegiatan daur ulang. Pendekatan

3R tidak hanya mengurangi timbunan sampah, tetapi juga mendorong masyarakat agar memiliki rasa andil dalam pemanfaatan kembali limbah menjadi produk yang memiliki nilai jual. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan mulai dari sisi eksternal yaitu dukungan pemerintah dan masyarakat masih tergolong rendah. Sementara secara internal, terdapat keterbatasan sarana dan prasarana menjadi hambatan utama yang disebabkan oleh tidak tersedianya anggaran penunjang kegiatan.

Konsep Bank Sampah Unit

Pelaksanaan bank sampah memiliki mekanisme yang sama dengan bank konvensional yang terdiri dari nasabah sistem pembukuan atau pencatatan serta pengelolaan manajemen. Letak perbedaannya pada bentuk setoran yang diberikan berupa sampah yang bernilai ekonomis, dalam pengelolaan bank sampah juga dituntut memiliki jiwa kreativitas inovasi dan jiwa kewirausahaan. Sebagai salah satu model dalam pengelolaan sampah bank sampah menjadi sarana alternatif yang efektif, aman dan ramah lingkungan. Selain itu, bank sampah mendorong masyarakat agar memilah sampah dimulai sejak dari rumah, baik sampah organik maupun anorganik sehingga proses pengelolannya lebih mudah dilakukan. (Suwerda, 2010)

Metode Penelitian

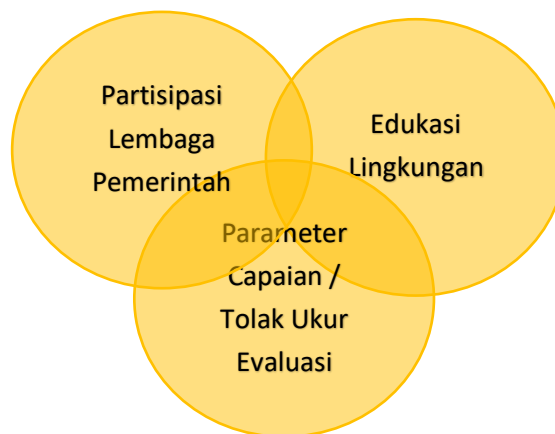
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan menguraikan data dari hasil penelitian yang telah diperoleh. Penelitian yang baik hendaknya dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar mendapatkan hasil yang maksimal. Penelitian ini juga menggunakan metode studi kasus yang dimana sebuah penelitian dapat berfokus dan mendalami suatu kasus tertentu. Menurut Singh (2005) dalam Riswanda (2024) studi kasus dimaknai sebagai suatu penelitian yang komprehensif dan mendalam dengan memanfaatkan beragam sumber informasi guna memperoleh pemahaman yang holistik terhadap suatu fenomena. Adapun Informan penelitian ditentukan melalui teknik purposive dengan tujuan menentukan informan yang dianggap paling mengetahui atau ahli di bidangnya, informan penelitian didapatkan 11

orang dengan terbagi menjadi 5 kategori meliputi Seksi pengelolaan sampah, Limbah B3 dan kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, Ketua dan Anggota bank sampah unit unyur makmur, Ketua Tim PKK Kelurahan dan Kecamatan Serang, Ketua RT Lingkungan Unyur dan Petugas kebersihan atau pengemudi truk sampah.

Pengumpulan data diperoleh melalui teknik observasi nonpartisipan, wawancara mendalam dengan semi terstruktur, dan dokumentasi. Tahap selanjutnya dalam menganalisis data menggunakan model Miles, Huberman dan Saldana (2014) terdapat tahapan seperti kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, keabsahan data diperkuat oleh teknik triangulasi dengan menggunakan triangulasi sumber dan metode, penelitian ini juga dilengkapi dengan member check.

Pembahasan

Penelitian ini akan dianalisis lebih lanjut melalui tiga hubungan antar aspek kunci berdasarkan hasil dan pengolahan data yang telah dilakukan oleh peneliti akan diuraikan sebagai berikut.



Gambar 1

Sumber : Peneliti, 2025.

Partisipasi Lembaga Pemerintah – Edukasi Lingkungan

Partisipasi lembaga pemerintah memiliki peran penting dalam menentukan arah dan kualitas edukasi lingkungan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Hubungan yang terjadi antar lembaga pemerintah dan proses edukasi lingkungan di Kota Serang menunjukkan bentuk kerja sama yang nyata, tetapi belum cukup untuk mendorong perubahan yang lebih besar. Dalam hal ini pemerintah daerah, melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dan Tim Penggerak PKK Kota Serang, telah membangun mekanisme koordinasi resmi seperti forum Bank Sampah yang dilakukan setiap tiga bulan, pendampingan wilayah, serta inisiasi program lingkungan di tingkat kota. Upaya ini penting sebagai tanda bahwa kebijakan pengurangan sampah tidak sepenuhnya berjalan tanpa pengawalan birokrasi. Namun, jika dilihat lebih dekat, bentuk kerja sama ini masih cenderung bersifat administratif yang masih lebih menekankan rapat, sosialisasi umum, dan pembagian peran formal dibanding proses edukasi yang terus berulang dan membentuk kebiasaan pola perilaku baru di masyarakat. Penyuluhan dari pemerintah pun tidak menjangkau semua unit Bank Sampah, tidak dilakukan secara rutin serta dapat dikatakan masih jarang hadir dalam aktivitas warga. Edukasi lebih sering terjadi di sekolah atau forum umum, sementara pendekatan di lingkungan permukiman masih tidak konsisten dan dilakukan secara berjarak atau belum teratur, sehingga belum cukup kuat untuk menanamkan pemahaman yang sama di tingkat warga. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan Bank Sampah Unit Unyur Makmur yang mengatakan bahwa

“Sebenarnya pemerintah itu kan bukan hanya soal anggaran, tapi juga pertama soal kebijakan, kemudian yang kedua soal program, ketiga soal edukasi dan keempat soal jaringan. Saat ini edukasi dari dinas tidak ada, tetapi kalo dari bank sampahnya sendiri sudah pasti 1x ada dalam sebulan”.

Menariknya, pengetahuan dan keterampilan justru lebih berkembang di dalam komunitas bank sampah itu sendiri. Anggota belajar melalui kegiatan rutin seperti pelatihan mengolah sampah rumah tangga membuat komposter, eco-enzyme, kerajinan, hingga praktik pemilahan sampah yang terbagi dalam beberapa jenis. Dalam proses

kegiatan ini terasa lebih hidup, konsisten dan mudah diterima oleh masyarakat sendiri karena berlangsung dalam rutinitas mingguan hingga bulanan dalam mengelola sampah tanpa adanya paksaan. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi lingkungan lebih efektif melalui interaksi langsung di komunitas dibandingkan instruksi formal dari lembaga.

Dalam situasi seperti ini juga diperlukannya peran dari aktor masyarakat sipil. Seperti peran WALHI secara nasional sering menyoroti bahwa pendidikan lingkungan harus berjalan berkesinambungan, merata, dan berbasis tekanan sosial terhadap perubahan perilaku publik, bukan hanya sebagai kampanye simbolik. Dalam konteks permasalahan di Kota Serang, WALHI dapat ditempatkan sebagai pembanding untuk menjelaskan bahwa edukasi kebijakan lingkungan yang ideal yaitu edukasi yang bersifat persuasif, mitigatif, sekaligus kritis terhadap kegagalan penegakan kebijakan lingkungan. Pergerakan WALHI mengusung model edukasi yang *civic-pressure driven* untuk menantang praktik kebijakan yang rapuh.

Sementara dalam penelitian ini, aktor yang terlibat belum mengadopsi pola edukasi yang menggugah, mengikat, dan menekan perubahan perilaku publik secara sistem sebagaimana seharusnya dilakukan dalam arena kebijakan lingkungan perkotaan berbasis masyarakat. Keterlibatan masyarakat yang dipadukan dengan dorongan dari advokasi WALHI dapat memberikan pengaruh terhadap kepuasan publik dibandingkan jika keduanya berjalan sendiri-sendiri. Selain itu WALHI juga hadir sebagai perantara yang menghubungkan suara masyarakat dengan pemerintah (Lestari et al., 2025)

Pada irisan ini menggambarkan aspek organisasi dan interpretasi oleh Charles O. Jones, yang dimana kondisi ini menunjukkan bahwa organisasi belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan edukasi lingkungan secara efektif dan efisien.

Edukasi Lingkungan – Parameter Capaian atau Tolak Ukur Evaluasi

Pada irisan ini menggambarkan aspek interpretasi dan penerapan oleh Charles O. Jones dengan menunjukkan hubungan yang kurang selaras antara proses belajar di masyarakat dan cara pemerintah menilai keberhasilan program. Di tingkat unit Bank Sampah, edukasi lingkungan berjalan cukup baik dan berulang. Pengelola bank sampah bersama anggota melakukan penimbangan sampah setiap bulan, berbagi keterampilan

pengolahan, serta mempraktikkan prinsip ekonomi sirkular di rumah tangga. Dampaknya terasa seperti anggota bertambah banyak, kemampuan teknis mereka semakin beragam (komposter, eco enzyme, lubang biopori, hingga kerajinan produk daur ulang), dan cara pandang warga terhadap Bank Sampah mulai berubah ke arah yang lebih positif melalui pengalaman nyata, bukan semata imbauan.

Namun demikian, keberhasilan di tingkat komunitas ini belum tercatat sebagai bagian dari capaian kinerja kota. Dalam Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang dimana dalam kebijakan tersebut menyatakan bahwa terdapat target dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga sebesar 30% dari angka timbulan sampah, hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Kasi Peningkatan Kapasitas LH pada Dinas Lingkungan Hidup yang menyatakan

“apalagi kebijakan strategi daerah mengikuti kebijakan strategi nasional ya di perpres itu target pengurangan sampah di 2025 harus 30%, tapi kami di 2024 secara keseluruhan baru sekitar 13% masih jauh dari target pemerintah ya.”

Padahal, aktivitas pemilahan dan pengurangan sampah di permukiman sudah meningkat cukup signifikan di sejumlah unit Bank Sampah. Hal ini menandakan bahwa perubahan perilaku cukup tumbuh dari edukasi komunitas, tetapi tidak sejalan dengan tingginya timbulan sampah yang belum seimbang dengan penguatan peran pemerintah daerah dan keterlibatan sektor swasta.

Irisan antara edukasi lingkungan dan parameter capaian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah belum sepenuhnya berjalan secara merata. Seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua bank sampah unit unyur makmur menyatakan bahwa

“mereka jadi bisa memilah sampah dengan baik yang tadinya semua botol disatuin ditumpuk, sekarang ada cara memilah sampah lebih baik. Kedua perilaku sehari-hari ya yang tadinya sampah organik dan anorganik mereka campur jadi satu ke tempat sampah kemudian dibuang kalo sekarang ngga, yang organiknya di olah pake komposter jadi dirumah rumah anggota sekarang ada alat komposter walaupun hanya sederhana berbentuk ember tapi itu isinya komposter. Selain komposter juga ada biopori untuk rt 01 saja sudah ada 16 titik rumah yang ada bioporinya jadi mereka bisa buang sisa makanan atau jeroan ikan ke biopori.

Selain itu, kalo dulu misal ada yang buang sampah hanya kami yang negur tapi anggota kami juga negur. “

Edukasi yang diberikan oleh bank sampah cukup baik namun hanya menjangkau sebagian kelompok masyarakat saja, selain itu edukasi yang telah berjalan belum cukup intensif unntuk membentuk pola perilaku kebiasaan masyarakat di Kota Serang. Artinya, masih terdapat keterbatasan edukasi yang berdampak pada parameter capaian pengurangan sampah yang telah ditargetkan pemerintah tidak sebanding dengan upaya edukasi yang ada.

Selanjutnya, edukasi yang dijalankan juga perlu hadir sebagai proses pembelajaran yang benar-benar membentuk masyarakat, bukan hanya memberi informasi sesaat. Edukasi yang nyata dan membangun yaitu edukasi yang menyentuh pengalaman sehari-hari warga, dekat dengan konteks lokal, dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mencoba, berlatih, serta merasakan manfaat langsung dari perilaku baru yang mereka terapkan. Dalam konteks pengelolaan sampah, bentuk edukasi seperti ini bukan sekadar sosialisasi umum, melainkan aktivitas yang menguatkan kebiasaan. Misalnya, praktik pemilahan sampah yang dipandu langsung di lingkungan rumah, pelatihan membuat kompos menggunakan sampah organik keluarga, hingga pendampingan rutin dan merata agar setiap rumah tangga bisa melihat perubahan nyata dari apa yang mereka lakukan. Ketika masyarakat merasakan hasilnya seperti berkurangnya bau sampah, halaman lebih bersih atau adanya nilai ekonomi dari sampah anorganik mereka mulai merasa bahwa perubahan perilaku bukan beban, melainkan kebutuhan. Kebiasaan ini perlu diterapkan dan menjadi sebuah kebiasaan di setiap daerah di Kota Serang untuk mencapai target pengelolaan sampah pemerintah,

Edukasi yang membangun juga perlu menghadirkan contoh nyata dari para pelaku lingkungan, baik dari kader lokal, pengurus Bank Sampah, maupun tokoh masyarakat yang dihormati. Solusi yang dapat dilakukan dengan mengundang kegiatan pengelolaan sampah yang menarik perhatian masyarakat seperti memperkuat edukasi dengan potensi ekonomi sirkular, mengembangkan UMKM berbasis sampah anorganik dan lain sebagainya.

Parameter Capaian atau Tolak Ukur Evaluasi – Partisipasi Lembaga Pemerintah

Pada bagian ini menggambarkan aspek penerapan dan organisasi oleh Charles O. Jones yang dimana posisi pemerintah di Kota Serang yang sudah terlihat aktif di tahap awal kebijakan, tetapi belum cukup kuat di tahap eksekusi yang mengurangi sampah secara nyata di level kota. Pemerintah memang telah melakukan beberapa hal penting, seperti menyusun aturan teknis daerah, mengadakan program kebersihan lingkungan seperti lomba Kampung Resik Lan Aman, serta mengajukan proposal bantuan fasilitas ke kementerian terkait. Langkah ini menunjukkan bahwa negara hadir dalam memberikan dasar hukum dan membangun dorongan awal bagi masyarakat untuk ikut terlibat. Namun, ketika kebijakan masuk ke tahap yang lebih teknis misalnya, kebutuhan lahan Bank Sampah, armada pengangkutan, atau fasilitas penunjang pemrosesan peran tersebut mulai melemah.

Informan salah satu anggota bank sampah unit unyur makmur yang juga mengatakan

“Sarana itu ada ya, tetapi jauh dari memadai. Kami sudah mengajukan proposal sarana dan prasarana namun belum ada tanggapan dari pemerintah terkait. Saat ini sarana dan prasarana seperti timbangan masih memakai timbangan analog, selain itu, terkait alat angkut kami mengalami kesulitan apalagi saat jumlah sampah yang cukup banyak. Kemudian soal tempat menampung sampah, jadi sampah ini kalo harga jualnya ingin tinggi maka harus di sortir dulu, dibersihkan dari residu residu yang ada dan itu kami perlu tempat setidaknya tempat yang tertutup jadi sampah yang sifatnya harus kering seperti kertas, kardus, duplex, dll kalo kena hujan harga jualnya juga rendah. Terus wadah pilah kami ingin tiap anggota ada wadah pilah biar jangan berserakan, selain itu juga kami sudah berjalan juga budidaya magot tapi itu juga belum ada kendang atau tempat yang ada atapnya. Jadi selama ini kami menggunakan sarana yang ada yang dimiliki masing masing anggota baik untuk magot, biopori.

Salah satu contohnya terlihat dari usulan bantuan fasilitas yang diajukan oleh Bank Sampah Unit Unyur Makmur, yang belum mendapat respons atau tindak lanjut dari Dinas terkait di daerah. Kondisi ini bukan berarti pemerintah tidak punya keinginan mendukung kebijakan, melainkan memperlihatkan adanya kesenjangan dalam hal respons cepat dan dukungan operasional dalam keberlangsungan kebijakan masih terhambat.

Dari sisi capaian, program seperti Kampung Resik Lan Aman memang berhasil meningkatkan minat warga untuk mendaftar dan membangun Bank Sampah baru. Namun, antusias masyarakat ini tidak diikuti dengan dukungan dan fasilitasi yang memadai. Di lapangan masih menunjukkan beberapa persoalan seperti masih maraknya TPS liar, karena tidak ada sanksi yang diterapkan secara tegas dan konsisten, minimnya pendampingan teknis rutin dari Dinas Lingkungan Hidup ke unit Bank Sampah yang sedang aktif berjalan, infrastruktur 3R seperti TPS3R yang tidak beroperasi secara berkelanjutan setelah selesai dibangun.

Beberapa fakta tersebut menunjukkan bahwa pada irisan partisipasi lembaga pemerintah dan parameter capaian terdapat belum menyentuh peningkatan kemampuan teknis pada lingkungan kota. Di sisi lain, keberlangsungan Bank Sampah yang saat ini berjalan lebih kuat justru banyak ditopang oleh anggota dan swadaya masyarakat itu sendiri.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah perkotaan berbasis masyarakat melalui bank sampah menunjukkan bahwa telah terjadi edukasi lingkungan yang berkembang di tingkat komunitas namun, belum terintegrasi dengan pola edukasi dari pemerintah. Selain itu, pemerintah hadir dalam bentuk regulasi dan dukungan formal tetapi belum menyediakan kapasitas operasional secara menyeluruh. Belum terjalinnya kerja sama dengan pihak swasta sebagai penunjang kebutuhan dan keberhasilan implementasi kebijakan. Masih terdapat pola perilaku masyarakat yang tidak teratur dalam membuang sampah, tindakan tersebut awalnya muncul sebagai tindakan individual yang kemudian menjadi kebiasaan sosial yang berlangsung secara turun temurun, karena masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa sampah merupakan tanggung jawab pemerintah semata. Terdapat berbagai solusi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki integrasi kebijakan dan memastikan bahwa partisipasi warga, edukasi lingkungan dan capaian pemerintah dapat berjalan selaras. Pertama, Memperkuat dan memperluas jejaring kolaborasi dan edukasi

berbasis komunitas seperti dengan menggandeng WALHI karena edukasi merupakan proses yang berulang. Kedua, penegakan regulasi yang konsisten terhadap pembuang sampah sembarangan serta masyarakat yang mendirikan TPS liar. Ketiga, mengoptimalkan pendampingan teknis rutin oleh DLH terutama pengoptimalan pada aspek sarana dan prasarana. Keempat, pemerintah perlu mendirikan dan mengembangkan program seperti Kampung Resik Lan Aman dengan sistem evaluasi yang lebih terukur. Dengan demikian, antusias dan partisipasi masyarakat dapat berkelanjutan dan memiliki kontribusi secara nyata terhadap pencapaian target kebijakan pengelolaan sampah perkotaan.

Daftar Pustaka

- Abidin, S. Z. (2017). *Kebijakan Publik* (Edisi 2). Salemba Humanika
- Agustino, L. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. CV. Alfabeta, 7.
- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Edisi Rev). Alfabeta Bandung.
- Dwi, B., Anwar, F., & D. T. (2021). *Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan*. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia*, 2(1), 92–101.
- Fadilla, A. A., & Kriswibowo, A. (2022). *Model Integrated Sustainable Waste Management dalam Pengolahan Sampah di Pusat Daur Ulang Jambangan Kota Surabaya*. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 4(2), 60.
<https://doi.org/10.20527/jpp.v4i2.5744>
- Shafritz, J. M., Russell, E. W., Borick, C. P., & Hyde, A. C. (2017). *Introducing public administration* (9th ed.). Routledge.
- Lestari, L. A., Perwitasari, D. R., Erika, B., Zana, I. S., & G. N. R. P. (2025). *Pengaruh partisipasi masyarakat dan advokasi WALHI DIY terhadap kepuasan pembuatan RTH Kricak*. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 12(1), 203–210.
- Manurung, L., McIntyre-Mills, J. J., Wirawan, R., Widianingsih, I., Riswanda, R., Gunawan, I. I., Nasrudin, A., & Runturambi, A. S. J. (2024). *SYSTEMIC*

EXPLORATION: A METALOGUE ON WATER GOVERNANCE IN JAKARTA AND ENVIRONS. Paper presented at 68th Annual Meeting of the International Society for the Systems Sciences, ISSS 2024, Washington, United States.

Miles, Huberman, S. (2014). *Qualitative Data Analysis a methods sourcebook* (Edition 3). Sage Publications.

Nugroho, R. (2017). *Public Policy* (Edisi Keenam). PT Elex Media Komputindo

Purwendah, E. K., Rusito, & Periani, A. (2022). Kewajiban Masyarakat Dalam Pemeliharaan Kelestarian Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. *Jurnal Locus Delicti*, 3(2), 121–134.

<https://doi.org/10.23887/jld.v3i2.1609>

Putera, W. Y., & Suprajogo, T. (2025). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Induk Patriot Di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat* (Doctoral dissertation, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI).

Riswanda. (2024). *Menafsirkan Paradigma Penelitian Kebijakan Publik*. CV. Sintesia.

Sorotan Riswanda. 2022. Kebijakan Pengelolaan Sampah Perkotaan. Diperoleh dari : <https://youtu.be/ISKh0J8SyUg?si=XvxuTZvo87yHQ6zd>. Diakses pada 15 Februari 2025

Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi. In *Brilliant an imprint of MIC Publishing*.

Suwerda, B. (2010). *Bank Sampah*. Werda Press.

Widianingsih, I., Paskarina, C., Riswanda, R., & Putera, P. B. (2021). Evolutionary Study of Watershed Governance Research: A Bibliometric Analysis. *Science &*

Technology Libraries, 40(4), 416–434.

<https://doi.org/10.1080/0194262X.2021.1926401>